

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM MENGATASI TINGKAT KEMISKINAN DI KECAMATAN INUMAN TAHUN 2007-2011

Oleh :

Lesna Wanita

(Lesnawanita@yahoo.com)

Pembimbing : Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu pemerintahan - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

Poverty, welfare, and unemployment is indeed an urgent priority issue to be addressed, both at the national, regional and district / city. Poverty reduction since reforms gained serious attention, because many cases are proving that the spread of poverty pressure will cause a number of counter-productive consequences for development (Ministry of Welfare, 2003). Poverty alleviation is an implementation of the mandate of the 1945 Constitution which has been in jabarkan into various national development agenda. In the Medium Term Development Plan (Plan) for example, the Government has implemented a Poverty Reduction as one of the main development priorities for the period 2009-2014. The document also refers to the National Poverty Reduction Strategy apply consistent achievement of the targets of the MDGs (Millennium Development Goals or MDGs). The purpose of this study was to answer the problems that exist in this study: first, to determine the extent of the district government efforts kuantan singing in overcoming poverty level in the District Inuman Regency Kuantan Singingi Year 2007-2011, the second is to determine what factors which causes the poverty level in the District Inuman Singingi Kuantan District, the third is to know how the impact of government policies on poverty Singingi Kuantan. The findings showed that the policy of the poverty level in the District of Kuantan Singingi is already well underway, but the lack of education that makes a lot of people are unemployed, and added more soil conditions, remote village landslide impede trade network to enter the town. It is therefore expected to Kuantan district government to better control again Singingi poverty level.

Key Word : Public policy, Development, Poverty

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan, kesejahteraan, dan pengangguran sesungguhnya adalah isu prioritas yang mendesak untuk ditangani,

baik pada tingkat nasional, regional maupun kabupaten/kota. Penanggulangan kemiskinan sejak reformasi memperoleh perhatian yang benar serius, disebabkan banyak kasus yang membuktikan bahwa merebaknya tekanan kemiskinan akan

menyebabkan timbulnya sejumlah akibat yang kontra-produktif bagi pembangunan (Menko Kesra, 2003).

Seperti di katakan Kwik Kian Gie (2003), akibat dari situasi krisis dan kemiskinan yang tidak segera tertangani antara lain adalah : (1) tingginya beban sosial ekonomi yang harus ditanggung masyarakat, (2) rendahnya kualitas dan produktifitas sumber daya manusia (3) rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, (4) menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (5) menurunnya kepercayaan masyarakat pada birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan (6) kemungkinan terjadinya kemerosotan mutu generasi yang akan datang.

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan pelaksanaan mandat dari UUD 1945 yang telah di jabarkan kedalam berbagai agenda pembangunan Negara. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) misalnya, Pemerintah telah menerapkan Penanggulangan Kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan untuk periode tahun 2009-2014. Dokumen yang juga mengacu kepada Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan menerapkan target-targetnya sejalan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau MDGs).

Melalui pendataan keluarga dapat diperoleh gambaran status kesejahteraan keluarga. Atas dasar pemenuhan kebutuhan keluarga yang diukur melalui indikator yang digunakan, setiap keluarga di seluruh Indonesia dapat dikategorikan dalam lima tahap yaitu :

- a. Keluarga Pra Sejahtera
- b. Keluarga Sejahtera I
- c. Keluarga Sejahtera II
- d. Keluarga Sejahtera III
- e. Keluarga Sejahtera III Plus

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan pelaksanaan mandat UUD 1945 yang telah di jabarkan ke dalam berbagai agenda pembangunan pembangunan Negara. Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM). Keterkaitan berbagai agenda pembangunan tersebut diharapkan lebih memfokuskan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga pencapaian target pengurangan kemiskinan dapat dipercepat. Untuk mempercepat sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah berupaya membentuk berbagai tim seperti Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang mencakup lintas sektor.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Riau yang secara resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 12 Oktober 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi berada di $0^{\circ} 00' - 1^{\circ} 00'$ Lintang Selatan dan $101^{\circ} 02' - 101^{\circ} 55'$ Bujur Timur dengan luas wilayah $7.656,03 \text{ km}^2$. Wilayah terluas berada di Kecamatan Singingi sebesar $1.953,66 \text{ km}^2$ dan Kecamatan Pangean dengan luas wilayah terendah sebesar $145,32 \text{ km}^2$. Sementara jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 sebesar 327.696 jiwa dengan kepadatan penduduk terbanyak di Kecamatan Kuantan Tengah sebesar 57.686 jiwa dan terendah di Kecamatan Hulu Kuantan sebesar 8.415 jiwa. Tahun 2007 jumlah penduduk miskin Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebanyak 16.737 KK dengan persentase dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007

No	Kecamatan	Jumlah RT	RT Miskin	%
1	Kuantan Mudik	7434	2037	27,40
2	Hulu Kuantan	1948	854	43,84
3	Gunung Toar	2901	986	33,99
4	Singingi	5521	1130	20,47
5	Singingi Hilir	6648	1799	27,06
6	Kuntan Tengah	11083	1727	15,58
7	Benai	7748	2163	27,92
8	Kuantan Hilir	6053	1618	26,73
9	Pangean	4341	1508	34,74
10	Logas Tanah Darat	4327	1558	34,76
11	Cerenti	3137	677	21,58
12	Inuman	3829	1080	28,21
Jumlah		64970	16737	25,76

Sumber : Pemkap Kuansing 2007

Melihat rumah tangga dan rumah tangga miskin di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Kecamatan, maka Kecamatan yang terbanyak persentase jumlah rumah tangga miskin adalah Kecamatan Hulu Kuantan, Logas Tanah Darat, Pangean dan Gunung Toar. Sedangkan yang Paling Rendah Persentase rumah tangga Miskin adalah Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Benai. Sedangkan dilihat dari data-data yang ada di Instansi Pemerintah bahwa Kecamatan Inuman merupakan Kecamatan yang Garis Kemiskinan yang terparah dari beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab Kemiskinan pada sekelompok masyarakat yang ada di Kecamatan Inuman tidak saja oleh faktor-faktor yang alamiah seperti kondisi tanah, letak desa yang berada dikawasan terpencil sehingga sulit untuk memasuki jaringan perdagangan. Tetapi faktor struktural yaitu keterbatasan sumber daya alam, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan cara pikir masyarakat yang masih kurang tentang pengetahuan dunia globalisasi. Kesulitan untuk beranjak dari kondisi ini menyebabkan mereka banyak yang patah arang dan frustrasi, kaum muda banyak yang menjadi pengangguran dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang selalu dihadapi oleh rumah tangga miskin di Kecamatan Inuman.

Setiap anggota keluarga harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencari nafkah berapapun kecilnya. Setiap anggota yang sudah produktif atau yang sudah berumur 15 tahun harus memiliki kepedulian terhadap kelangsungan hidup rumah tangga di atas kepentingan pribadi dan anak-anak yang sudah berumur 15 tahun keatas. Jika keluarga membutuhkan tenaganya mereka harus mengabaikan hak-haknya seperti sekolah jika perlu harus drop out.

2. Tinjauan Pustaka

Istilah “Kebijakan” dalam bahasa inggris ‘politik’ yang berasal dari bahasa latin, yaitu kata polis yang artinya community atau paguyuban (persekutuan) hidup manusia, masyarakat atau city (Negara kota). Secara etimologis, istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, sansekerta adalah “polis” (Negara kota) dan “pur” (kota) dikembangkan sedangkan dalam bahasa latin menjadi “politea” (negara) dan akhirnya dalam bahasa inggris pertengahan “policie”, yang berarti menangani masalah- masalah publik

dan administrasi pemerintahan. (Wiliam N. Dunn, 2003:51).

Kemudian menurut **Thomas R. Dye dan Ishak (2010:35)** mendefinisikan kebijakan publik (kebijakan Negara) sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya Dye menjelaskan bahwa pemerintah memilih melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan umum itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan umum. Hal ini di sebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah.

Menurut pendapat **Chandler dan Plano** (Dalam Kebn, 2004;56) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk mencerahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Ia juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah.

Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, menurut **Gabriel Iglesias** yang di kutip andi yusran menyebutkan beberapa persyaratan pelaksanaan kebijakan antara lain:

- a. Resources, tersedianya sumber daya manusia dan sumber daya alam, termasuk keuangan dan lain-lain
- b. Struktur, adanya struktur yang menunjukkan adanya aturan-aturan dan hubungan –hubungan organisasional, dimana program pembangunan nasional bisa

berjalan baik formal maupun non formal

- c. Teknologi, adanya teknologi yang didalamnya termasuk kemampuan untuk mengoperasikan organisasi yang lebih baik dan yang lebih khusus lagi dan adanya pengetahuan dan kemampuan praktik untuk menjalankan program pembangunan.
- d. Support, adanya dukungan luas dari masyarakat
- e. Leadership, adanya kemampuan yang handal

Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

- Kendala sumber daya
- Kendala struktur kerja
- Kendala teknologi
- Kendala partisipasi masyarakat
- Kendala kepemimpinan

Menurut **Mirille S. Grindlle**, berhasil tidaknya implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh dua variable besar, yakni variable “ content of policy” (isi kebijakan) dan variable (context of policy) (lingkungan kebijakan).

Variable isi kebijakan mencakupi yaitu:

- a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuatan kebijakan
- e. Siapa pelaksanaan program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan meliputi:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga yang berkuasa
- c. Kepatuhan dan daya tangkap

Kajian terhadap implementasi kebijakan publik akan memfokuskan kepada dua aspek yaitu siapa yang akan melaksanakan kebijakan dan pengaruhnya terhadap isi kebijakan serta dampak dari

kebijakan elitis tersebut. Selanjutnya pendekatan yang dikemukakan oleh **G.C Edwards III** menyangkut syarat-syarat penting keberhasilan dari suatu program kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi. Hal ini penting karena implementasi suatu kebijakan menyangkut banyak pihak, terutama para pejabat birokrasi yang melaksanakan kebijakan tersebut. Mereka harus berhubungan satu dengan yang lain secara sinergis, konsisten dan tepat waktu. Hal ini dapat mengurangi erosi maupun terhadap pesan yang disampaikan.
2. Sumber daya manusia. Mereka adalah yang melaksanakan pekerjaan. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan jumlah maupun mutu yang sesuai. Disamping itu masih diperlukan pula adanya wewenang dan tanggung jawab yang jelas serta fasilitas memadai.
3. Sikap para pelaksana adalah kesepakatan terhadap kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini dapat diperoleh melalui penciptaan budaya organisasi
4. Struktur organisasi. Struktur ini harus mampu mewadai proses kerja organisasi bersangkutan dan pengaruh lingkungan.

3. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi dalam mengatasi tingkat kemiskinan di Kecamatan Inuman Tahun 2007-2011?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Kecamatan Inuman Tahun 2007-2011?
3. Bagaimana dampak kebijakan pemerintah daerah kuantan

singingi terhadap tingkat kemiskinan ?

4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah daerah kabupaten kuantan singing dalam mengatasi tingkat kemiskinan di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2007-2011,
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Kecamatan Inuman tahun 2007-2011,
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari kebijakan pemerintah daerah kuantan singingi terhadap tingkat kemiskinan,

5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Mahasiswa/I, dan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, masyarakat Kecamatan Inuman, dalam Rangka Mengatasi Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2007-2011 .

METODE PENELITIAN

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode yang di gunakan dalam penelitian ini peneliti penggunaan metode kualitatif. Taylor dan bogdan, menyatakan bahwa penelitian kualitatif dapat di artikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat di amati orang-orang yang diteliti.

Untuk pendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai

kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi tingkat kemiskinan di kecamatan inuman kabupaten kuantan singingi, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Pengumpulan data dengan cara turun kelapangan untuk melihat secara langsung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mengetahui tingkat kemiskinan tersebut.
2. Studi dokumen (*dokument research*), studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari instansi terkait yang berhubungan dengan tulisan ini guna melengkapi data yang diperlukan oleh peneliti.
3. Studi lapangan (*field research*), dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara, merupakan suatu cara untuk mendapatkan data secara langsung kepada responden mengenai data yang diteliti.

Penganalisaan data dalam penelitian ini dengan cara Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan cara memberikan gambaran secara umum dari penelitian yang menghasilkan data mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari variabel yang diteliti dan disajikan dengan uraian dan penjelasan berdasarkan data hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan definisi kebijakan dengan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat sekali kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Sedangkan implementasi

kebijakan adalah rancangan untuk membuat kebijakan itu sendiri atau tindakan-tindakan untuk membuat suatu kebijakan.

A. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengatasi Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Inuman

1. Peningkatan Pendidikan

Masalah penting yang timbul dalam pedesaan adalah tingkat pendidikan pada masyarakat pedesaan itu sendiri. Angkatan kerja aktif di pedesaan pada umumnya hanya memiliki tingkat pendidikan SD ke bawah.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Ekonomi Masyarakat

Masalah yang cukup serius yang dialami oleh masyarakat adalah pengangguran dan kemiskinan. Masalah pengangguran dan kemiskinan terutama diakibatkan tingginya pertumbuhan penduduk.

3. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kondisi kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa masih tinggi angka kelahiran, pelaku kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan yang masih rendah, dan pengertian masyarakat yang rendah terhadap pemeliharaan kesehatan secara modern.

4. Pembangunan Infrastruktur Penghubung

Untuk membuka dan memajukan daerah pedalaman yang mempunyai sarana dan prasarana penghubung terbatas, diupayakan dengan membangun jaringan jalan dan jembatan baru serta memperbaiki jalur transportasi yang sudah ada.

5. Meningkatkan Kualitas Perkebunan Masyarakat

Rencana peningkatan kualitas perkebunan merupakan bagian dari pembangunan bidang ekonomi dan bagian integral dari pembangunan daerah yang bertujuan mewujudkan cita-cita nasional mencapai masyarakat adil dan makmur, sasaran pembangunan perkebunan dalam jangka panjang adalah menciptakan kekuatan dan kemampuan perkebunan yang tangguh.

B. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Kebijakan pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi dalam rangka pengentasan kemiskinan adalah terfokus kepada panti jompo dan keluarga kurang mampu, pada umumnya pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi telah membuat suatu program yaitu memberikan bantuan kepada panti jompo dan keluarga kurang mampu

Tabel 3.1. Daftar Jumlah Panti Jompo Per Desa/Kelurahan Di Kecamatan Inuman Tahun 2013

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Panti Jompo
1	Bedeng Sikuran	16
2	Banjar Nan Tigo	16
3	Pulau Sipan	10
4	Pulau Busuk Jaya	13
5	Lebuh Lurus	16
6	Kampung Baru Koto	14
7	Ketaping Jaya	18
8	Koto Inuman	23
9	Pasar Inuman	9

10	Pulau Panjang Hulu	14
11	Pulau Panjang Hilir	30
12	Pulau Busuk	11
13	Seb. Pulau Busuk	15
14	Sigaruntang	12
	JUMLAH	217

Sumber Data: Kasubak Kesos Kab.Kuansing

C. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Setiap anggota keluarga harus memiliki kemampuan untuk mencari nafkah, beberapapun kecilnya perolehan nafkah itu. Setiap keluarga produktif juga harus memiliki kepedulian terhadap kelangsungan hidup rumah tangga di atas kepentingan pribadi. Dengan pegitu setiap anggota rumah tangga produktif bisa memperoleh penghasilan yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup bersama. Hasil wawancara dari beberapa responden kunci menunjukkan gambaran kepasrahan mereka.

D. Dampak Dari Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Kebijakan pemerintah sangat penting dalam pemerintahan karena berhasil tidaknya implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh dua variable besar, yakni variable “ content of policy” (isi kebijakan) dan variable (context of policy) (lingkungan kebijakan).

1. Kepentingan Yang Terpengaruhi oleh Kebijakan

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengatasi tingkat kemiskinan ini dapat kita lihat dari berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas dan peran pemerintah daerah tersebut sebagai motor penggerak bagi setiap desa – desa yang dibawahnya. Selain itu keberhasilan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya akan menunjukkan tercapainya tujuan dari otonomi setiap daerah yaitu kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Yang Dihasilkan

Dari hasil Kebijakan Pembangunan Daerah dalam rangka mengatasi tingkat kemiskinan yaitu dengan cara strategi penanggulangan kemiskinan dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat kurang mampu yang penanganannya lebih difokuskan perencanaan percepatan pembangunan di daerah yang kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, serta daerah yang ketersediaan infrastruktur ekonomi masih rendah dibandingkan daerah lain.

Tujuan dari strategi penanggulangan kemiskinan ini adalah adanya koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi dan tersedianya sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya dan Kecamatan Inuman pada khususnya.

3. Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Derajat perubahan yang di inginkan dari hasil adanya strategi penanggulangan kemiskinan tahun 2007-2011 antara lain memberikan perubahan kondisi masyarakat miskin. Dengan adanya strategi penanggulangan kemiskinan di Kecamatan

Inuman Kabupaten Kuantan Singingi ini perubahan yang diharapkan adalah kurangnya angka kemiskinan, infrastruktur perdesaan meningkat, kinerja aparatur desa meningkat, dan terciptanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang menganggur.

4. Kedudukan Pembuatan Kebijakan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pemerintah untuk mencapai keberhasilan suatu pemerintahannya. Maka kedudukan dalam pembuatan suatu kebijakan harus sama dan seimbang antara pembuat dan pelaksana sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Kedudukan pemerintah disini adalah membuat kebijakan sedangkan melaksanakannya adalah masyarakat.

5. Siapa Pelaksana Program

Dalam melaksanakan suatu kebijakan pemerintahan di perlukan adanya dukungan atau kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yang terlibat di dalam suatu program. Pemerintah hanya aparatur daerah yang membuat suatu kebijakan yaitu tentang strategi penanggulangan kemiskinan sedangkan masyarakat adalah pelaksana program tersebut. Berhasil atau tidaknya suatu program yang di buat oleh pemerintah tergantung kepada masyarakat yang menerima dan menjalankan suatu program tersebut.

6. Sumber Daya Yang Dikerahkan

Berhasil atau tidaknya suatu program dari sebuah kebijakan salah satunya tergantung kepada aspek sumber daya, dalam suatu kebijakan pengentasan kemiskinan sumber daya yang digunakan adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di daerah itu sendiri. Sumber daya manusia utama dalam implementasi kebijakan adalah pegawai/staf karena dalam pengimplementasian suatu

kebijakan pemerintah yang berperan langsung dalam program penanggulangan kemiskinan adalah pegawai pemerintah dan masyarakat adalah sebagai penerima suatu kebijakan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang terkait dengan judul skripsi ini, maka peneliti dapat menyimpulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka mengatasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya dan Kecamatan Inuman pada khususnya yaitu meningkatkan pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin. Selain itu dalam rangka mengurangi angka kemiskinan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai suatu program yaitu memberikan bantuan kepada panti jompo atau sering di sebut lansia dan masyarakat kurang mampu dengan cara memberikan semacam raskin dan modal untuk membuka usaha.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tingkan kemiskinan di Kecamatan Inuman yaitu faktor alamiah dan struktural. Kurangnya pendidikan, keterbatasan sumber daya alam, dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menyebabkan banyak yang pengangguran dan kondisi tanah, letak desa yang berada di kawasan terencil sehingga sulit untuk memasuki jaringan perdagangan.
3. Dampak dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu tingkat kemiskinan yang terjadi di

Kecamatan Inuman sangat dipengaruhi dari kurangnya pendidikan masyarakat sehingga sulit untuk maju. Keberhasilan suatu kebijakan pemerintah dapat dilihat dari pemerintahan dan masyarakatnya sendiri dan didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya alam sumber daya manusia disini adalah pegawai dan staf dalam lembaga pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi hendaknya dapat melakukan Pengawasan, Pembinaan, Pelatihan yang lebih kepada Pemerintah Desa agar pemerintah daerah bisa mensosialisasikan kepada masyarakatnya.
2. Kerja sama tim harus ada pada kedua belah pihak, Pemerintah Daerah yaitu eksekutif dan legislatif, dan Pemerintah Desa sebagai perangkat dan pendukung di Desa agar tercipta masyarakat yang sejahtera.
3. Konsistensi dalam penyelenggaraan pembangunan yang dimulai dari Visi dan Misi, dilanjutkan dengan strategi, kemudian implementasi, dan ditutup dengan kontrol atau pengendalian, konsistensi tidak identik dengan kekuatan namun justru dengan disiplin di setiap lembaga yang berwenang.

Daftar Pustaka

Buku

- Adisasmita, Rahadjo. Manajemen Pemerintah Daerah : Graha Ilmu. Yogyakarta 2011.
- Ala, Andre. Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan. Yogyakarta: Liberty. 1981.
- Chambers, Robert. Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang. Jakarta: LP3ES 1987.
- Dewanta,awan Setya. (ed.). Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia. Yogyakarta: Aditya Media 1995.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2003.
- Khadafi, Rizal. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya : Redaksi bukune, Jakarta 2010.
- Khairul, Muluk. Desentralisasi dan Pemerintah Daerah. Malang: Bayu Media 2005.
- Korten, D.C. dan Shahrir. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1988.
- Lauer H. Robert. Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Jakarta: Rineka Cipta 2001.
- Manning, Chris dan Peter Van Diermen. Indonesia Ditengah Transisi: Aspek- Aspek Sosial Repormasi dan Krisis. Yogyakarta LKiS 2000
- Nugroho, Riant D. Kebijakan Public (*Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*). PT. Elex Media Komputindo. Jakarta 2004
- Subarsono, AG. Drs, M.Si, MA. “Analisis Kebijakan Publik” : “Konsep, Teori, dan Aplikasi”. Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2005.
- Suhartono, Edi PhD. Analisi Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial): Alfabeta, Bandung 2005.
- Supriatna, Tjahya, Dr, M.S. Birokrasi Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan : Humaniora Utama Press (HUP). Bandung 1997.
- Sutyastie, Soemitra Remi. Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia (Suatu Analisis Awal). Yogyakarta: Rineka Cipta 2003.
- Yusran, Andi. Kebijakan Desentralisasi : *Rancangan Teoritik dalam Rangka Analisis*. Jurnal Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Riau Pekanbaru 2003.

Skripsi

- Skripsi Putri Octadita, Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing dalam Mmembangun Desa Tertinggal di Kecamatan Pangean Tahun 2011, 2008.
- Skripsi Zakaria, Membahas Ranperda Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak, 2009

Sumber Lainnya

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi 2011
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Profil Kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi 2012